



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD	25
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	46
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Bojonegoro	54
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	55
5.2 Rencana Tindak lanjut	55

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, yang telah disesuaikan dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah Tahun 2023 tersebut, menjadikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada target-target perubahan yang telah disusun, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan program serta kegiatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan/pengurangan kegiatan, penambahan/pengurangan anggaran kegiatan dan perubahan indikator/rincian indikator pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa disesuaikan dalam penyusunan RKA Perubahan dan DPPA sejalan dengan dinamika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam upaya mencapai target kinerja Tahun 2023, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan Tahun 2023 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2023. Dengan demikian diharapkan target yang telah ditetapkan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat tercapai sesuai harapan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Kabupaten Bojonegoro**



LULUK ALIFAH

Pembina Tingkat I

NIP.19691128 200312 2 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top down/bottom up.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan tindaklanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rankhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 maka dalam penyusunannya harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan perubahan RKPD pada tahun berkenaan;
- b. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
- c. Program dan kegiatan dalam Rankhir Perubahan Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati dalam forum MUSRENBANG;
- d. Program dan kegiatan dalam perubahan Renja dilengkapi dengan penyesuaian pencapaian indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju;

Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai dasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimuthakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023
- b. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- d. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- f. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- g. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan perubahan anggaran dan belanja ;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Bojonegoro pada PAPBD;
- c. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;

- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- e. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- f. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro;

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah;
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja Pendanaan
- Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator capaian program/keluaran kegiatan dan realisasi pada tahun lalu dan target pada tahun berjalan

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja adalah tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan SKPD selama satu tahun. Dokumen tersebut antara lain RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, Rencana Kerja, dan lain sebagainya. Dari pagu anggaran Rp. 283.589.132,-

terrealisasi Rp. 270.856.916 atau 90,42% dengan capaian target kinerja 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan selama satu tahun, terlaksananya penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan.

Dari pagu anggaran Rp. 6.278.553.578,- terealisasi Rp. 5.728.274.871,- atau 91,24% dengan capaian target kinerja 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja adalah terlaksananya bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan kinerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dari pagu anggaran Rp. 17.500.000,- terealisasi Rp. 2.725.750,- atau 15,58% dengan capaian target kinerja 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, barang cetakan, bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan serta terlaksananya penataan arsip dinamis. Dari pagu anggaran Rp. 219.383.932,- terealisasi Rp. 209.982.100,- atau 95,71% dengan capaian target kinerja 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja adalah tersedianya sarana dan prasarana persuratan, terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, serta tersedianya jasa pelayanan umum kebutuhan kantor. Dari pagu anggaran Rp. 274.009.385,- terealisasi Rp. 219.812.478,- atau 80,22% dengan capaian target kinerja 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja adalah tersedianya biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan kerja lainnya. Dari pagu anggaran Rp. 427.825.350,- terealisasi Rp. 350.913.276,- atau 82,02% dengan capaian target kinerja 100%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 13 sub kegiatan.**

Pencapaian kinerja adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi penyusunan KUA dan PPAS;
- b. Terlaksananya koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Terlaksananya koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;

- d. Terlaksananya koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - e. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - f. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - g. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 - h. Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
 - i. Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja;
 - j. Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
 - k. Terlaksananya kegiatan pembinaan penganggaran daerah
- Dari pagu anggaran Rp. 2.398.001.300,- terealisasi Rp. 1.407.402.974,- atau 56,69% dengan capaian target kinerja 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 10 sub kegiatan.

Pencapaian kinerja adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
- b. Terlaksananya pengelolaan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- c. Terlaksananya pengendalian dan penerbitan anggaran

- kas dan SPD;
- d. Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah;
 - e. Terlaksananya koordinasi fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya;
 - f. Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan penatausahaan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - g. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan PFK;
 - h. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan utang piutang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan, dan penempatan uang sebagai optimalisasi Kas;
 - i. Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait;
 - j. Tersusunnya pertunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub

kegiatan;

- k. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

Dari pagu anggaran Rp. 1.055.935.258,- terealisasi Rp. 943.886.187,- atau 89,39% dengan capaian target kinerja 100%.

- 3. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah terdiri dari 13 sub kegiatan. Indikator pencapaian kinerja kegiatan adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran daerah;
- b. Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban ekuitas pendapatan belanja, pembiayaan pendapatan LO dan Beban;
- c. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- d. Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Tersusunnya laporan Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- h. Tersusunnya analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

- i. Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- k. Terlaksananya pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
- l. Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota;
- m. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan data statistic keuangan pemerintah daerah

Dari pagu anggaran Rp. 780.982.898,- terealisasi Rp. 601.010.606,- atau 76,96% dengan capaian target kinerja 100%.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan.

Pencapaian kinerja adalah :

- a. Terlaksananya analisis investasi pemerintah daerah;
- b. Terlaksananya analisis perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. Terlaksananya pengelolaan dana darurat
- d. Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

Dari pagu anggaran Rp. 1.487.600.565.876,- terealisasi

Rp. 1.365.141.927.792,-,- atau 93,11% dengan capaian target kinerja 100%.

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan.

Pencapaian kinerja adalah :

- a. Terlaksananya inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- b. Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan
- c. Terlaksananya pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota.

Dari pagu anggaran Rp. 1.487.600.565.876,- terealisasi Rp. 1.365.141.927.792,-,- atau 93,11% dengan capaian target kinerja 100%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 13 sub kegiatan pencapaian kinerja adalah :

- a. Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- b. Tersusunnya Standar harga;
- c. Tersusunnya Standar Barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
- d. Tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- e. Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah;

- f. Terlaksananya inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. Terlaksananya pengamanan barang milik daerah;
- h. Terlaksananya penilaian barang milik daerah;
- i. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan barang milik daerah;
- j. Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- k. Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah;
- m. Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota.

Dari pagu anggaran Rp. 2.775.415.205,- terealisasi Rp. 2.582.626.046,- atau 93,05% dengan capaian target kinerja 100%.

Secara detail Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Bojonegoro

NAMA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kegiatan s/d tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02	BIDANG URUSAN KEUANGAN								
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	7	100	7	100
5	02	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	1	1	100	1	100
5	02	01	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	11	11	100	11	100
5	02	01	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	11	11	100	11	100
5	02	01	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	11	11	100	11	100
5	02	01	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	11	11	100	11	100
5	02	01	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100	3	100
5	02	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	12	12	100	12	100
5	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	8	8	100	8	100
5	02	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12	100	12	100
5	02	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12	12	100	12	100
5	02	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100	100	100	100	100
5	02	01	2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	1	1	100	1	100
5	02	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	1	1	100	1	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	240	240	240	100	240	100	100
5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	480	480	480	100	480	100	100
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	24	24	24	100	24	100	100
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi erencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD OPD yang disiapkan tepat waktu	148	148	148	148	100	148	100	100
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	12	12	12	100	12	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	24	24	24	100	24	100	100
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	100	3	100	100
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	70	70	70	100	70	100	100
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4	4	4	4	100	4	100	100
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	4	4	4	100	4	100	100
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	8	8	8	100	8	100	100
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	8	8	8	100	8	100	100
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	100	100	100	100	100	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	200	200	200	100	200	100	100
5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000	1000	1000	1000	100	1000	100	100
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, dimusnahkan dan dihapus	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2	2	2	2	100	2	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kajian capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan BPKAD Bojonegoro

No	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Tujuan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro		v	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Sasaran 1 : Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	v		80%	80%	90%	90%	80%	100%	90%	90%	Tercapai
	Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	v		80%	80%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	Tercapai
3	Sasaran 2 : Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	v		60%	60%	75%	75%	60%	70%	75%	75%	Tercapai
	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Persentase temuan BPK tentang pengelolaan barang milik daerah yang ditindaklanjuti	v		50%	50%	60%	60%	50%	60%	60%	60%	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama seluruhnya tercapai 100%. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang realisasinya melebihi target yaitu :

- a. Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP dari target 80% terealisasi 100%
- b. Indikator Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti prosentase

realisasinya 85% dari target direncanakan 80%.

- c. Indikator Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerahnya ditarget sebanyak 60% terealisasi 70%;
- d. Persentase temuan BPK tentang pengelolaan barang milik daerah yang ditindaklanjuti dari target 50% terealisasi 60%.

Untuk Tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis diproyeksikan tercapai sesuai dengan target perencanaan.

Tabel 2.3

REALISASI PERJANJIAN KINERJA BPKAD TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Baik	Sangat Baik
		Prosentase Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85%	93,03%
		Nilai MCP KPK	95%	95%
		Inovasi	1 Inovasi/Penghargaan	1 Inovasi/Penghargaan

Pencapaian realisasi target Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro beberapa indikator telah sesuai target yaitu :

1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro mendapatkan WTP sebagaimana Surat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Tanggal 26 April 2022 Nomor 460/S-HP/XVII.SBT-04/2022 Hal Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

2. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 88,36 (sangat baik) untuk Layanan Penerbitan SP2D sebagaimana sertifikat Nomor 003.023/Sert/PT.CSI/XI/2022.
3. Total Nilai Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pada Akhir Tahun 2022 sebesar 95 dengan indikator penilaian :
 - a. Perencanaan Penganggaran dengan nilai 99
 - b. Pengadaan Barang dan jasa dengan nilai 93
 - c. Perizinan dengan nilai 100
 - d. Pengawasan APIP dengan nilai 93
 - e. Manajemen ASN dengan nilai 96
 - f. Pengelolaan BMD dengan nilai 90
 - g. Tata kelola keuangan Desa dengan nilai 97
4. Untuk Capaian Target Penyerapan Anggaran ditargetkan sebesar 85% dalam pelaksanaannya melampaui target yaitu tercapai 93% atau dengan capaian kinerja sebesar 109%.
5. Pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat Inovasi SI RANIA . SI RANIA adalah aplikasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodir Laporan Realiasi Anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka :enyediaan data dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah secara realtime.
6. Sedangkan yang belum mencapai target adalah Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disebabkan adanya indikator kinerja yang kurang spesifik dan terukur yang telah ditindaklanjuti dengan mengadakan penyesuaian indikator kinerja.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Isu-isu strategis yang bersumber dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain :

1. Masih terdapat aset yang belum dilengkapinya bukti kepemilikan yang sah;
2. Belum optimalnya akurasi data aset pada SKPD;
3. Belum tertibnya pengelolaan belanja sehingga pencairan anggaran masih menumpuk pada akhir tahun;
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
5. Belum meratanya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah ;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
7. Perlu adanya inovasi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik;

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,

- sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.
 7. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD kepada masyarakat / publik maupun perangkat daerah lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023

Rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan review pada rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2023 yang disandingkan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap rancangan Akhir RKPD Perubahan tahun 2023

KODE	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu indikatif	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	02		BIDANG URUSAN KEUANGAN			BIDANG URUSAN KEUANGAN							
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bojonegoro	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	8,491,180,152.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bojonegoro	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	8,491,180,152.00	
5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	434,836,895.00	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	434,836,895.00
5	02	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	1	6,372,838.00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	1	6,372,838.00
5	02	01	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	11	5,977,688.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	11	5,977,688.00
5	02	01	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	11	6,403,953.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	11	6,403,953.00
5	02	01	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	11	6,441,638.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	11	6,441,638.00
5	02	01	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	11	6,468,858.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	11	6,468,858.00
5	02	01	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	296,702,690.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	296,702,690.00
5	02	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	12	106,469,230.00		Bojonegoro	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	12	106,469,230.00
5	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	8	6,611,830,371.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	8	6,611,830,371.00
5	02	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	5,877,717,061.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	5,877,717,061.00
5	02	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12	710,504,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12	710,504,000.00
5	02	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bojonegoro	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100	3,323,590.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bojonegoro	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100	3,323,590.00
5	02	01	2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	2,651,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	2,651,000.00
5	02	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	1	2,701,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	1	2,701,000.00
5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	1,984,300.00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	1,984,300.00
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Bojonegoro	Laporan Keuangan SKPD yang	1	11,651,950.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Bojonegoro	Laporan Keuangan SKPD	1	11,651,950.00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		disusun			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		yang disusun			
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bojonegoro	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	1,297,470.00	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bojonegoro	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	1,297,470.00	
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	107,314,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	107,314,000.00	
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bojonegoro	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	107,314,000.00	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bojonegoro	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	107,314,000.00	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	443,116,350.00	Administrasi Umum Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	443,114,350.00	
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bojonegoro	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	12,320,110.00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bojonegoro	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	12,320,110.00	
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bojonegoro	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	160,927,005.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bojonegoro	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	160,927,005.00	
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bojonegoro	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	208,303,735.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bojonegoro	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	208,303,735.00	
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bojonegoro	Jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	8,961,500.00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bojonegoro	Jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	8,961,500.00	
5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bojonegoro	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	5,070,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bojonegoro	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	5,070,000.00	
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bojonegoro	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	47,534,000.00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bojonegoro	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	47,532,000.00	
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	464,765,786.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	464,765,786.00	
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bojonegoro	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	26,475,775.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bojonegoro	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	26,475,775.00	
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bojonegoro	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	148,724,843.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bojonegoro	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	148,724,843.00	
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bojonegoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	289,565,168.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bojonegoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	289,565,168.00	
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	429,308,750.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	429,318,750.00	
5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	291,441,250.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	291,441,250.00	
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	73,867,500.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	73,867,500.00	
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	64,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	64,000,000.00	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	1,594,704,581,989.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	1,594,704,581,989.00	
					Bojonegoro	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100			Bojonegoro	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100		
					Bojonegoro	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100			Bojonegoro	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100		
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran	100	1,602,315,500.00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran	100	1,602,315,500.00	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

						daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan					daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan				
5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	45,156,100.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	45,156,100.00		
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	45,185,900.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	45,185,900.00		
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	18,990,400.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	18,990,400.00		
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	32,994,500.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	32,994,500.00		
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	5,700,400.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	5,700,400.00		
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	5,700,400.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	5,700,400.00		
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	302,182,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	302,182,000.00		
5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	297,858,600.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	297,858,600.00		
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	793,294,100.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	793,294,100.00		
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	2	1,838,550.00	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	2	1,838,550.00		
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	2,160,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	2,160,000.00		
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	1,914,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	1,914,000.00		
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	49,340,550.00	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	49,340,550.00		
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bojonegoro	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	1,018,871,208.00	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bojonegoro	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	1,018,871,208.00		
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi	2	154,231,450.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi	2	154,231,450.00		

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Pengelolaan Kas Daerah		kebutuhan kas yang difasilitasi			Pengelolaan Kas Daerah		kebutuhan kas yang difasilitasi		
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Bojonegoro	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Bojonegoro	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2	0
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bojonegoro	Jumlah dokumen SPD OPD yang disiapkan tepat waktu	148	138,854,050.00	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bojonegoro	Jumlah dokumen SPD OPD yang disiapkan tepat waktu	148	138,854,050.00
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bojonegoro	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bojonegoro	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1	
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	114,526,740.00	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	114,526,740.00
5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	310,838,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	310,838,000.00
5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bojonegoro	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	122,374,960.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bojonegoro	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	122,374,960.00
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1	0	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1	0
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bojonegoro	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2	0	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bojonegoro	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2	0
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bojonegoro	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1	0	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bojonegoro	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1	0
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	178,046,008.00	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	178,046,008.00
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	720,406,000.00	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	720,406,000.00
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	125,743,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	125,743,000.00
5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	38,118,000.00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	38,118,000.00
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Bojonegoro	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan	3	48,583,400.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Bojonegoro	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan	3	48,583,400.00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran		Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu			Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran		Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu		
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2	12,210,900.00	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2	12,210,900.00
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	169,419,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	169,419,000.00
5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	12,179,400.00	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	12,179,400.00
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bojonegoro	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	155,286,900.00	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bojonegoro	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	155,286,900.00
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	12,943,000.00	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	12,943,000.00
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	34,764,700.00	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	34,764,700.00
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	34,124,700.00	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	34,124,700.00
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4	39,052,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4	39,052,000.00
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	12,515,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	12,515,000.00
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	25,466,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	25,466,000.00
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	1,590,569,568,78 1.00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	1,590,569,568,78 1.00
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	363,706,070.00	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	363,706,070.00
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan	Bojonegoro	persentase bantuan	100	1,518,326,056,56	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan	Bojonegoro	persentase bantuan	100	1,518,326,056,56

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Keuangan yang disalurkan tepat waktu	1.00	dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Keuangan yang disalurkan tepat waktu	1.00		
5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bojonegoro	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	45,482,984,118.00	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bojonegoro	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	45,482,984,118.00
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bojonegoro	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	26,396,822,032.00	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bojonegoro	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	26,396,822,032.00
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bojonegoro	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	793,420,500.00	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bojonegoro	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	793,420,500.00
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	237,300,000.00	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	237,300,000.00
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	310,478,500.00	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	310,478,500.00
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1	245,642,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1	245,642,000.00
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	1,654,577,915.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bojonegoro	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	1,654,577,915.00
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	1,654,577,915.00	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	1,654,577,915.00
5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Bojonegoro	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1	15,561,000.00	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Bojonegoro	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1	15,561,000.00
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2	0	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2	0
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	93,594,600.00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	93,594,600.00
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	48,603,500.00	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	48,603,500.00
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	372,961,885.00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	372,961,885.00
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bojonegoro	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100	47.500.000,00	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bojonegoro	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100	47.500.000,00
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	476,690,000.00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	476,690,000.00
5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	179,308,000.00	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	179,308,000.00
5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000	23.750.000,00	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000	23.750.000,00
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dipindahtangkan, dimusnahkan dan dihapus	100	238,301,980.00	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dipindahtangkan, dimusnahkan dan dihapus	100	238,301,980.00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	85,832,200.00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	85,832,200.00	
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2	16,474,750.00	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2	16,474,750.00	
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinan pengelolaan BMD	2	56,000,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinan pengelolaan BMD	2	56,000,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selalu berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPKAD sebagai fungsi penunjang di bidang keuangan maka tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM dan lainnya.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : BPKAD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu ***Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023,

oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 mengacu pada pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Bojonegoro yaitu :

“Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan Dan Sosial Budaya Lokal Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman. Sejahtera Dan Berdaya Saing”

Prioritas Pembangunan selama lima tahun kedepan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 dengan arah kebijakan pembangunan tematik Tahun 2023 yaitu “Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Kualitas Lingkungan melalui Infrastruktur dan Transformasi Digital yang Mantap Berkelanjutan”.

Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 juga harus mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Secara detail konsistensi tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 dengan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Konsistensi Tema Pembangunan

NO	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN
1	Peningkatan Produktivitas untuk Transformais Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Kualitas Lingkungan melalui Infrastruktur dan TRansformasi Digital yang Mantap Berkelanjutan

Konsistensi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2023 antara kebijakan Pembangunan Nasional, kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Konsistensi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	
1	2	3	4	5
1	Prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan public	Prioritas 7 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan budaya lokal	Meningkatkan kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan local. Meningkatkan toleransi kehidupan beragama
2	Prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan public Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas 7 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Jawa Timur	Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab	Meningkatnya kinerja pemerintah. Meningkatnya kualitas ASN Meningkatnya kualitas pelayan public
3	Prioritas 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 3 Peningkatan layanan Pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, yang mendukung sumber daya manusia yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Meningkatkan kualitas Kesehatan Meningkatkan daya beli masyarakat

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	
1	2	3	4	5
4	<p>Prioritas 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p>	<p>Prioritas 3 Peningkatan layanan Pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan</p> <p>Prioritas 4 Peningkatan Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local</p>	Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas	<p>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas</p> <p>Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk</p> <p>Meningkatnya ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak</p> <p>Meningkatnya taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</p>
5	<p>Prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p>	<p>Prioritas 1 Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata</p>	Peningkatan lapangan pekerjaan di masyarakat melalui upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif	<p>Meningkatnya kesempatan kerja</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan ekonomi</p> <p>Meningkatkan usaha kecil dan mikro serta lembaga ekonomi kreatif</p>
6	<p>Prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan</p>	<p>Prioritas 5 Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi</p>	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

NO	Prioritas Pembangunan			Sasaran Pembangunan
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	
1	2	3	4	5
	dasar			Meningkatnya daya saing sektor pertanian Meningkatnya nilai investasi
7	<p>Prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p>Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Prioritas 2 Pengadaan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur</p> <p>Prioritas 6 Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup</p>	Peningkatan konektivitas wilayah melalui infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	<p>Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang</p> <p>Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman</p> <p>Meningkatnya infrastruktur sumber daya air</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>Menurunnya resiko bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik</p>

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD

Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator dari Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu Meningkatnya Kinerja pengelolaan adalah memperoleh Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 - Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan;
 - Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP;
 - Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti .
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :
 - Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah;
 - Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan;
 - Persentase temuan BPK tentang pengelolaan barang milik daerah yang ditindaklanjuti.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pendanaan
	BIDANG URUSAN KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	APBD
				Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	APBD
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	APBD
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	APBD
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

			Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Daerah	
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemsunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
		1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
					APBD
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	APBD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	APBD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	APBD
			Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan APBD tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
5												
5	02											
5	02	01										
5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Bojonegoro	100	8,491,180,152.00	APBD	-	100	9.096.560.897,00
5	02	01	2.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Bojonegoro	7	434,836,895.00	APBD	-	7	523.794.075,00
5	02	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	1	6,372,838.00	APBD	-	1	6.696.460,00
5	02	01	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11	5,977,688.00	APBD	-	11	6.242.540,00
5	02	01	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11	6,403,953.00	APBD	-	11	6.668.840,00
5	02	01	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11	6,441,638.00	APBD	-	11	6.441.590,00
5	02	01	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11	6,468,858.00	APBD	-	11	6.714.710,00
5	02	01	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	3	296,702,690.00	APBD	-	3	97.723.690,00
5	02	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	Bojonegoro	12	106,469,230.00	APBD	-	12	393.306.245,00
5	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	Bojonegoro	8	6,611,830,371.00	APBD	-	8	6.959.842.677,00
5	02	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bojonegoro	12	5,877,717,061.00	APBD	-	12	6.423.154.367,00
5	02	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	Bojonegoro	12	710,504,000.00	APBD	-	12	512.814.000,00
5	02	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	Bojonegoro	100	3,323,590.00	APBD	-	100	3.323.590,00
5	02	01	2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Bojonegoro	1	2,651,000.00	APBD	-	1	2.651.000,00
5	02	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	Bojonegoro	1	2,701,000.00	APBD	-	1	2.701.000,00
5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian	Jumlah Laporan yang disusun	Bojonegoro	1	1,984,300.00	APBD	-	1	1.984.300,00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Bojonegoro	1	11,651,950.00	APBD	-	1	11.651.950,00
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Bojonegoro	2	1,297,470.00	APBD	-	2	1.562.470,00
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Bojonegoro	1	107,314,000.00	APBD	-	1	254.579.900,00
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	Bojonegoro	1	107,314,000.00	APBD	-	1	254.579.900,00
5	02	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	443,114,350.00	APBD	-	12	207.416.110,00
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	12,320,110.00	APBD	-	12	10.344.360,00
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	160,927,005.00	APBD	-	12	129.341.960,00
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bojonegoro	12	208,303,735.00	APBD	-	12	25.507.090,00
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan yang	Bojonegoro	12	8,961,500.00	APBD	-	12	8.962.700,00
5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Bojonegoro	12	5,070,000.00	APBD	-	12	5.130.000,00
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	Bojonegoro	12	47,532,000.00	APBD	-	12	28.130.000,00
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	464,765,786.00	APBD	-	12	601.461.485,00
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Bojonegoro	12	26,475,775.00	APBD	-	12	26.346.585,00
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bojonegoro	12	148,724,843.00	APBD	-	12	140.056.800,00
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	289,565,168.00	APBD	-	12	435.058.100,00
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Bojonegoro	12	429,318,750.00	APBD	-	12	549.466.650,00
5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	Bojonegoro	12	291,441,250.00	APBD	-	12	251.778.750,00
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	Bojonegoro	12	73,867,500.00	APBD	-	12	147.687.500,00
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	64,000,000.00	APBD	-	12	150.000.400,00
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,594,704,581,989.00	APBD	-	100	1.460.889.432.305,00
					Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	Bojonegoro	100		APBD	-	100	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

					Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Bojonegoro	100		APBD	-	100	
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,602,315,500.00	APBD	-	100	1.530.647.450,00
5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	2	45,156,100.00	APBD	-	2	60.327.100,00
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Bojonegoro	2	45,185,900.00	APBD	-	2	45.518.600,00
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	Bojonegoro	74	18,990,400.00	APBD	-	74	46.439.900,00
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	32,994,500.00	APBD	-	74	31.505.500,00
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	5,700,400.00	APBD	-	74	10.189.400,00
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	5,700,400.00	APBD	-	74	10.189.400,00
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	240	302,182,000.00	APBD	-	240	192.571.700,00
5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	480	297,858,600.00	APBD	-	480	246.742.500,00
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	24	793,294,100.00	APBD	-	24	810.469.500,00
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	1,838,550.00	APBD	-	2	3.880.550,00
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	2,160,000.00	APBD	-	2	2.532.750,00
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	1,914,000.00	APBD	-	2	2.501.550,00
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	Bojonegoro	74	49,340,550.00	APBD	-	74	67.779.000,00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	Bojonegoro	100	1,018,871,208.00	APBD	-	100	1.058.681.190,00
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	Bojonegoro	2	154,231,450.00	APBD	-	2	208.998.850,00
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	Bojonegoro	2	0	APBD	-	2	0
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD OPD yang disiapkan tepat waktu	Bojonegoro	148	138,854,050.00	APBD	-	148	47.294.000,00
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	Bojonegoro	1		APBD	-	1	
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	Bojonegoro	12	114,526,740.00	APBD	-	12	61.534.140,00
5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	Bojonegoro	1	310,838,000.00	APBD	-	1	229.769.680,00
5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	Bojonegoro	12	122,374,960.00	APBD	-	12	202.089.380,00
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	Bojonegoro	1	0	APBD	-	1	0
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	Bojonegoro	2	0	APBD	-	2	0
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	Bojonegoro	1	0	APBD	-	1	0
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	Bojonegoro	24	178,046,008.00	APBD	-	24	308.995.140,00
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	720,406,000.00	APBD	-	100	757.517.403,00
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	2	125,743,000.00	APBD	-	2	125.743.000,00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	2	38,118,000.00	APBD	-	2	26.520.000,00
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	3	48,583,400.00	APBD	-	3	48.583.400,00
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	12,210,900.00	APBD	-	2	12.210.900,00
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	169,419,000.00	APBD	-	2	316.020.000,00
5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	12,179,400.00	APBD	-	2	1.235.400,00
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Bojonegoro	70	155,286,900.00	APBD	-	70	119.401.900,00
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	12,943,000.00	APBD	-	2	1.999.000,00
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	34,764,700.00	APBD	-	1	67.666.700,00
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	34,124,700.00	APBD	-	1	8.334.103,00
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	Bojonegoro	4	39,052,000.00	APBD	-	4	27.052.000,00
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	Bojonegoro	4	12,515,000.00	APBD	-	4	1.252.000,00
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	25,466,000.00	APBD	-	1	1.499.000,00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,590,569,568,781.00	APBD	-	100	1.456.792.865.762,00
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	363,706,070.00	APBD	-	1	363.706.070,00
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	1,518,326,056,561.00	APBD	-	100	1.346.504.098.208,00
5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	45,482,984,118.00	APBD	-	100	86.401.542.650,00
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	26,396,822,032.00	APBD	-	100	23.523.518.834,00
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	793,420,500.00	APBD	-	100	749.720.500,00
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	8	237,300,000.00	APBD	-	8	236.500.000,00
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	Bojonegoro	8	310,478,500.00	APBD	-	8	267.578.500,00
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Bojonegoro	1	245,642,000.00	APBD	-	1	245.642.000,00
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,654,577,915.00	APBD	-	100	1.697.503.339,00
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	Bojonegoro	100	1,654,577,915.00	APBD	-	100	1.697.503.339,00
5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	15,561,000.00	APBD	-	1	0
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	0	APBD	-	2	0
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	93,594,600.00	APBD	-	2	91.416.600,00
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Bojonegoro	1	48,603,500.00	APBD	-	1	83.250.000,00
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	Bojonegoro	1	372,961,885.00	APBD	-	1	326.657.735,00
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	Bojonegoro	100	47.500.000,00	APBD	-	100	0
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	Bojonegoro	100	476,690,000.00	APBD	-	100	594.290.000,00

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	Bojonegoro	200	179,308,000.00	APBD	-	200	166.060.000,00
5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	Bojonegoro	1000	23.750.000,00	APBD	-	1000	0
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, dimusnahkan dan dihapus	Bojonegoro	100	238,301,980.00	APBD	-	100	256.844.480,00
5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Bojonegoro	2	85,832,200.00	APBD	-	2	101.234.524,00
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	16,474,750.00	APBD	-	2	0
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinan pengelolaan BMD	Bojonegoro	2	56,000,000.00	APBD	-	2	77.750.000,00

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Bojonegoro

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengoordinasikan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten Bojonegoro namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten Bojonegoro dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan yang bertujuan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun DPAP yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja;
3. Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini, dapat diketahui capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya dokumen perubahan Rencana Kerja ini, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Kabupaten Bojonegoro**



LULUK ALIFAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008